

BAB 5

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra selama 5 minggu sejak tanggal 29 September 2025 hingga 1 November 2025 adalah:

1. Calon apoteker dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang apotek sesuai dengan regulasi terbaru.
2. Membentuk kompetensi profesional calon apoteker agar mampu melaksanakan pekerjaan kefarmasian secara tepat dan bertanggung jawab mulai dari pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar yang berlaku
3. Calon apoteker mampu melaksanakan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, pemberian informasi obat, konseling pasien, dan pemantauan terapi obat sesuai *standar Good Pharmacy Practice*.

5.2 Saran

Saran bagi mahasiswa calon apoteker setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra selama 5 minggu sejak tanggal 29 September 2025 hingga 1 November 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa calon apoteker diharapkan aktif dalam bertanya dan berdiskusi dengan apoteker pembimbing selama pelaksanaan PKPA guna memperluas pengetahuan serta pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mahasiswa calon apoteker perlu menumbuhkan rasa percaya diri serta inisiatif dalam berkomunikasi dengan pasien, di bawah

bimbingan apoteker, terutama saat memberikan pelayanan informasi obat, konseling, maupun swamedikasi.

3. Mahasiswa calon apoteker diharapkan memperdalam pemahaman mengenai berbagai jenis obat, baik berdasarkan kelas terapi, indikasi, maupun cara penggunaannya, agar dapat mendukung terselenggaranya pelayanan kefarmasian yang optimal dan berkualitas bagi pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (OSS). Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan

- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2024. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permenkes Nomor 14 Tahun 2021. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan Obat dan Bahan Obat. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tenaga Teknis Kefarmasian. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK.01.07/MENKES/1335/2024 tentang Standar Kompetensi Tenaga Vokasi Farmasi. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi Tenaga Kesehatan secara Elektronik. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. Pedoman Keselamatan Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Jakarta.

- Pedoman dan Publikasi Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI). 2023. Pedoman Pelaporan Efek Samping Obat (MESO) dan Medication Error di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. BPOM RI, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 1993. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 919/Menkes/Per/X/1993 tentang Kriteria dan Tata Cara Penggunaan Obat Wajib Apotek. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- World Health Organization (WHO). 2011. Good Pharmacy Practice: Guidelines for Community and Hospital Pharmacists. Joint FIP/WHO Publication.
- AHFS Drug Information. 2022. American Hospital Formulary Service (AHFS) Drug Information. American Society of Health-System Pharmacists, Bethesda, MD.
- MIMS Indonesia. 2024. MIMS Indonesia Online. MIMS Pte Ltd. www.mims.com/Indonesia
- Drugs.com. 2024. Comprehensive Drug Database & Interaction Checker. <https://www.drugs.com>
- Brunton, L.L., Hilal-Dandan, R., Knollmann, B.C. 2018. Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics. 13th Edition. McGraw-Hill Education, New York.
- BNF 76. 2019. British National Formulary (March–September 2021). BMJ Group & Pharmaceutical Press, Londo